

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 Pasal 9 ayat (1) tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian telah mengatur bahwa pemecahan tanah pertanian yang luasnya di bawah batas minimum 2 (dua) hektar kecuali karena pewarisan adalah dilarang. Namun pada kenyataannya, masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di wilayah Kabupaten Kudus melalui jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya, akibat hukum, serta peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dari pemecahan tanah pertanian di bawah batas minimum melalui jual beli. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris melalui data primer dan data sekunder, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan analisis berupa analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pemecahan tanah pertanian di bawah batas minimum melalui jual beli di Kabupaten Kudus disebabkan karena 3 (tiga) faktor, salah satunya adalah adanya kepentingan atau situasi yang mendesak. Akibat hukumnya tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960, yaitu pidana kurungan selama 3 bulan dan/atau denda sebanyak Rp10.000,-. Peran Kantor Pertanahan sama besarnya seperti dalam pendaftaran tanah pada umumnya, yang terletak dalam proses pendaftaran pemindahan hak.

Kata Kunci: *landreform, jual beli, tanah pertanian, Kantor Pertanahan*

ABSTRACT

Law Number 56 Prp. Year 1960 Article 9 paragraph (1) concerning the Determination of Agricultural Land Area has regulated that the division of agricultural land with an area below the minimum limit of 2 (two) hectares except for inheritance is prohibited. However, in reality, violations of these provisions still often occur in the Kudus Regency area through buying and selling. This study aims to analyze the causal factors, legal consequences, and the role of the Kudus Regency Land Office in implementing land registration from the division of agricultural land below the minimum limit through buying and selling. The approach method used in this study is empirical legal through primary data and secondary data, with descriptive analytical research specifications. The data collection technique used is through interviews and literature studies with analysis in the form of qualitative analysis. The results of this study indicate that the causal factors for the division of agricultural land below the minimum limit through buying and selling in Kudus Regency are due to 3 (three) factors, one of which is the existence of urgent interests or situations. The legal consequences are stated in Article 10 paragraph (1) of Law Number 56 Prp. In 1960, namely imprisonment for 3 months and/or a fine of Rp10,000. The role of the Land Office is as large as in land registration in general, which lies in the process of registering the transfer of rights.

Keywords: *landreform, buying and selling, agricultural land, Land Office.*